



RENCANA KERJA KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

KANTOR KECAMATAN PELAIHARI

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 dapat diselesaikan.

RENJA Kecamatan Pelaihari dibuat dalam rangka penyusunan RKPD untuk Tahun 2023 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun 2023 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD, dan setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD TA 2023. Oleh karena itu, penyusunan RENJA-SKPD sangatlah penting dalam suatu proses perencanaan untuk pencapaian visi dan misi, baik untuk Kepala Daerah maupun visi dan misi Kecamatan Pelaihari.

Dalam dokumen RENJA Kecamatan Pelaihari tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Pelaihari yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Pelaihari, Juli 2022
Camat Pelaihari,



RIKA AMALIA S.STP, M.Si
Pemkaha
NIP. 19840320200212 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA - SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja PelayananKecamatan Pelaihari.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	19
BAB V PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
2.1	Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2021	7
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	10
2.3	Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari	15
4.1	Program/Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023	19
4.2	Program/Kegiatan Kelurahan Sarang Halang Tahun 2023	21
4.3	Program/Kegiatan Kelurahan Pabahanan Tahun 2023.....	22
4.4	Program/Kegiatan Kelurahan Karang Taruna Tahun 2023	23
4.5	Program/Kegiatan Kelurahan Angsau Tahun 2023.....	24
4.6	Program/Kegiatan Kelurahan Pelaihari Tahun 2023.....	25
4.7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa SKPD menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA). Atas dasar peraturan tersebut, maka tidak terkecuali Kecamatan Pelaihari selaku SKPD untuk Tahun Anggaran 2023 harus menyusun RENJA.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

RENJA adalah rencana kerja tahunan yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Renstra atau rencana kerja 5 (lima) tahunan. RENJA disusun dengan mengacu pada Rencana Strategi (RENSTRA), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan RENSTRA agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

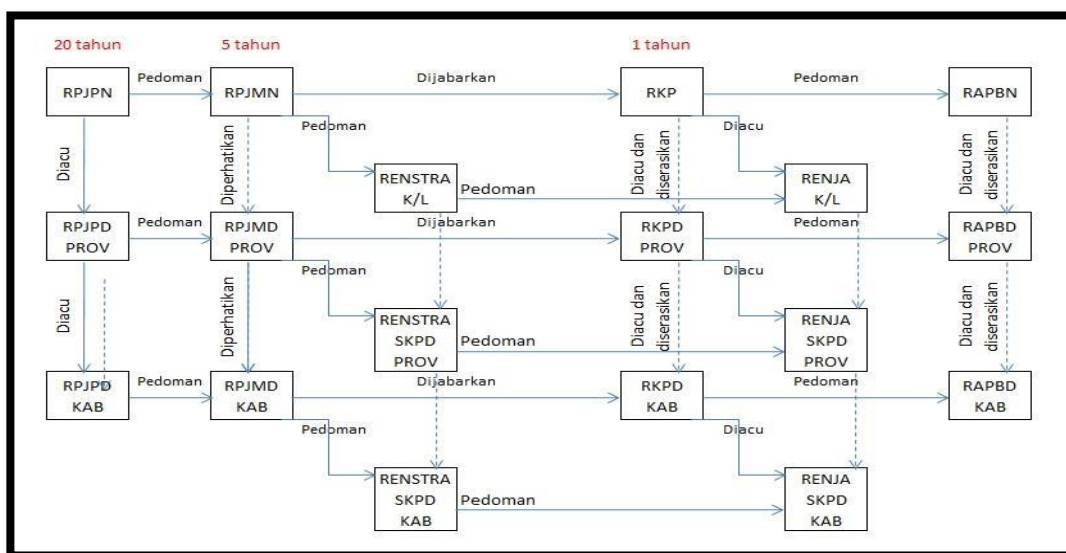
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah dokumen untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Pelaihari dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 disusun berdasarkan dan Inmedagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2022 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2023 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 .

Gambar 1.1



Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kcamatan Pelaihari Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pelaihari untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pelaihari.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Renja, Program dan Kegiatan yang akan diusulkan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 terdiri dari target dan realisasi fisik dan keuangan kegiatan Belanja Langsung yang ada dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Pada tahun 2021, Kecamatan Pelaihari memiliki 6 Program dan 10 kegiatan serta 27 Sub Kegiatan. Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Persentase tingkat realisasi program/kegiatan Kinerja Keuangan Kecamatan Pelaihari adalah sebesar 79,45 %.

Perkiraan target Renja Tahun 2022 yang sedang berjalan diharapkan akan tercapai 100%. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.2.

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi			Permasalahan/ Kendala	Ket.
					Fisik	Keuangan			
					%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM		10.221.482.957,00		8.016.095.435,00	78,42		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	9 Dokumen	4.594.000,00	100,00	1.699.400,00	36,99		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	800.000,00	100,00	199.800,00	24,98		
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	100,00	999.600,00	83,30		
	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	100,00	500.000,00	41,67		
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	4 Dokumen	1.394.000,00	100,00	0,00	0,00		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	17 Dokumen	9.575.497.571,00		7.456.639.473,00	77,87		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	9.518.363.619,00	100,00	7.413.406.473,00	77,89		
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	624.000,00	100,00	0,00	0,00		
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen	16 Dokumen	56.509.952,00	100,00	43.233.000,00	76,51		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	5 Jenis	305.860.430,00		272.666.722,00	89,15		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	7 jenis	2.614.590,00	85,71	1.898.500,00	72,61		
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44 Jenis	164.472.440,00	95,45	144.478.322,00	87,84		
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan BBM Kendaraan Dinas	12 Bulan	22.954.000,00	100,00	22.954.000,00	100,00		
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	7.852.400,00	100,00	5.680.700,00	72,34		
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah penyediaan makanan dan minuman - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1560 orang 12 bulan	107.967.000,00	98,08	97.655.200,00	90,45		
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	4 Jenis	294.754.496,00		260.561.231,00	88,40		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga PTT yang dibayar	3 orang	70.803.328,00	100,00	66.481.045,00	93,90		
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	4 item	36.050.000,00	85,00	25.822.410,00	71,63		
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	49.297.050,00	100,00	47.385.000,00	96,12		
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah belanja jasa jaminan barang milik daerah Jumlah pembelian alat pembersih dan bahan pembersih Jumlah Pembuatan Panggung dan	12 bulan 22 Jenis 1 Paket	138.604.118,00	98,00	120.872.776,00	87,21		

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi			Permasalahan/ Kendala	Ket.
					Fisik	Keuangan			
					%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Backdrop kantor							
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	29 Unit	40.776.460,00		24.528.609,00	60,15		
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, pelumas kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Kecamatan Pelaihari 6 unit Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 Kecamatan Pelaihari 6 unit	36.326.460,00	100,00	20.228.609,00	55,69		
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	4.450.000,00	100,00	4.300.000,00	96,63		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM		13.149.800,00	0,00	7.650.000,00	58,18		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		13.149.800,00	0,00	7.650.000,00	58,18		
	1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen IKM	13.149.800,00	100,00	7.650.000,00	58,18		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM		109.040.351,00		52.060.000,00	47,74		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan	9 kali	109.040.351,00		52.060.000,00	47,74		
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	25.549.900,00	100,00	14.325.000,00	56,07		
	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pameran	42.535.751,00	50,00	5.950.000,00	13,99		
	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	40.954.700,00	100,00	31.785.000,00	77,61		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM		30.480.000,00		28.245.000,00	92,67		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat d kecamatan yang di fasilitasi	8 kali	30.480.000,00		28.245.000,00	92,67		
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi	30.480.000,00	100,00	28.245.000,00	92,67		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM		1.209.010.165,00		1.101.302.910,00	91,09		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pembinaan terhadap ASN, Masyarakat serta Aparat terkait	5 kali	1.209.010.165,00		1.101.302.910,00	91,09		
	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Terlaksananya penyuluhan pembinaan kebangsaan dan ketahanan nasional	8.047.300,00	100,00	7.948.900,00	98,78		

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi			Permasalahan/ Kendala	Ket.
					Fisik	Keuangan			
					%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Bupati, Pejabat Pemkab dengan masyarakat Jumlah Organisasi Penerima Hibah Jumlah STQ Tingkat Kecamatan Pelaihari Jumlah terkirimnya Kafilah/Official dalam kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut	1 kali 15 kelompok 1 kali 90 orang	1.200.962.865,00	100,00	1.093.354.010,00	91,04		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM		20.597.200,00		13.806.600,00	67,03		
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 Desa	20.597.200,00		13.806.600,00	67,03		
	1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah peserta sosialisasi	40 orang	7.157.300,00	100,00	6.936.600,00	96,92		
	2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah musrenbang kecamatan	2 Kali	13.439.900,00	50,00	6.870.000,00	51,12		
	JUMLAH			11.603.760.473,00		9.219.159.945,00	79,45		

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 4 01 06 41 01	Penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Jumlah penyelenggaraan pelayanan masyarakat	4	1 dokumen	1	1	100%	1 dokumen	2	50%
4 01 4 01 06 41 02	Penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah	Jumlah penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah	1	0,25	0,5	0,5	100%	0,75	0,5	0,5
4 01 4 01 06 42	Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	IKM								
4 01 4 01 06 42 01	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Jumlah pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pemerintah desa	240	60 orang	60	60	100%	-	120	50%
4 01 4 01 06 43	Program Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	IKM								
4 01 4 01 06 43 01	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pemerintah desa	4	1 kali	1	1	100%	1 kali	2	50%
4 01 4 01 06 43 02	Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olahraga	Jumlah pentas seni budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olahraga	4	1 kali	1	1	100%	1 kali	2	50%
4 01 4 01 06 43 05	Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan	4	1 kali	1	1	100%	1 kali	3	75%

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2						3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)	
4	01	4	01	06	44		Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	IKM								
4	01	4	01	06	44	01	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	240	60 orang	60	60	100%	60	180	75%
4	01	4	01	06	44	01	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	240	60 orang	60	60	100%	60	180	75%
4	01	4	01	06	45		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	IKM								
4	01	4	01	06	45	01	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	8	2 kali	2	1	50%	1	3	38%
4	01	4	01	06	45	01	Perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelaihari

Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Kecamatan Pelaihari menyelenggarakan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bupati Tanah Laut, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Kecamatan Pelaihari adalah melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan, perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial dan budaya diwilayah kerjanya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas pelayanan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Memberikan pelayanan Bidang Pemerintahan Umum, Desa dan Kelurahan.
3. Memberikan pelayanan bidang Kependudukan dan Kemasyarakatan.
4. Memberikan pelayanan bidang Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Budaya.
5. Memberikan pelayanan dibidang Keamanan dan ketertiban, pertahanan Sipil dan perlindungan masyarakat.
6. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan pembangunan bagi masyarakat.

Bentuk jenis layanan yang diberikan oleh Kecamatan Pelaihari yaitu :

- a. Pelayanan Non Perijinan
 1. Rekomendasi Perizinan
 2. Rekomendasi Nikah
 3. Pengantar Pindah Domisili
 4. Pengantar KTP
 5. Pengantar Kartu Keluarga
 6. Legalisasi Permohonan Perizinan
 7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
 9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
 10. Legalisasi Proposal Bantuan

11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
 12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
 13. Legalisasi Surat Kehilangan
 14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
 15. Legalisasi Permohonan Perizinan
- b. Pelayanan Perijinan
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial
 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil
 3. Izin Bilyard Non Komersil
 4. Izin Playstation/Video Game

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Koordinasi dan sinergi program antar SKPD Kabupaten Tanah Laut selama ini sudah terakomodir dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten serta forum SKPD. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan sudah terkoordinasikan dengan baik. Sementara untuk program diKecamatan Pelaihari sendiri sudah ada dalam Renstra Kecamatan Pelaihari yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pelaihari yang juga menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari

Tugas Pokok dan Fungsi		Masalah
Tugas Pokok	Kecamatan Pelaihari mempunyai tugas dan fungsi Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah	Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara perencanaan program pembangunan dan perekonomian produksi pertanian kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya dilingkungan kecamatan. b. Penyelenggara tugas pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum pembangunan pertanian sosial budaya lingkungan hidup dan pertanahan. c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan. d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama. e. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-Instansi terkait diwilayahnya. g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan. 	

Tugas Pokok dan Fungsi	Masalah
h. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan, dan i. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.	

Dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Pelaihari tahun 2018-2023 terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan dan peluang yang di hadapi oleh Kecamatan Pelaihari adalah :

1. Tantangan

- a. Adanya perubahan kebijakan/peraturan.
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian kinerja pelayanan.
- c. Terbatasnya jumlah SDM untuk mengisi/ditempatkan di Kecamatan.

2. Peluang

- a. Adanya penerapan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.
- b. *Political Will* Pemerintah Kabupaten yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Dukungan dari stakeholder terkait untuk peningkatan pelayanan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pelaihari dan juga sekaligus yang menjadi isu penting terhadap pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Kecamatan Pelaihari tahun 2023, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pelaihari yaitu:

- 1. Menambah staf yang produktif/berkualitas untuk ditempatkan di Kecamatan Pelaihari.
- 2. Mengadakan sosialisasi/pelatihan, koordinasi dan pembinaan secara lebih intensif.
- 3. Memberikan anggaran yang secara rasional dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana dan untuk melaksanakan kegiatan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di Kecamatan Pelaihari diusulkan melalui kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan di kecamatan. Sebelum Musrenbang Kecamatan dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan Musrenbang Desa yang hasilnya menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam Musrenbang Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan usulan masing-masing desa dan Pemerintah Daerah sedianya dapat merealisasikannya melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pelaihari yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan instansi yang terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut darisasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada Kecamatan Pelaihari pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

Tujuan Renja Kecamatan Pelaihari tahun 2023 adalah sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Pelaihari, yaitu melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Tujuan jangka menengah Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pelaihari adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.
4. Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pelaihari, selain itu juga mendukung dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, Kecamatan Pelaihari sebagai salah satu SKPD yang lebih dominan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Pelaihari akan terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Untuk mendukung dalam pencapaian visi dan misi tersebut, program-program kerja untuk 5 (lima) tahunan selanjutnya dijabarkan kedalam program-program kerja tahunan. Jumlah program kerja Kecamatan Pelaihari tahun 2023 terdiri dari 6 program dan 9 dan 23 sub kegiatan. Adapun program tersebut yaitu :

Tabel 4.1 Program/Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.809.831.620,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.985.000,00
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.985.000,00
2	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	0
3	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	0
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0
5	Evaluasi kinerja perangkat daerah	2.000.000,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.394.789.153,00
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9.394.789.153,00
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	0
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	500.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.314.979,00
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.271.187,00
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24.608.065,00
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.629.647,00
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.456.080,00
5	Penyediaan bahan/material	11.000.000,00
6	Fasilitasi kunjungan tamu	750.000,00
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56.600.000,00
8	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	0
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0
1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0
2	Pengadaan mebel	0
3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0
4	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	0
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
	Daerah	215.442.488,00
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	0
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.050.000,00
	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0
	4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	179.392.488,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.300.000,00
	1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.000.000,00
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	40.500.000,00
	2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.800.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0
	1 Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal	0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.500.000,00
	1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan didesa	0
	2 Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0
	3 Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.500.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.021.340,00
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	8.021.300,00
	1 Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.021.340,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.201.536.245,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.201.536.245,00
	1 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0
	2 Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	1.139.074.068,00
	3 Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	62.462.177,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.340.414,00
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	15.340.414,00
	1 Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	0
	2 Fasiitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	4.812.440,00
	3 Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	2.453.094,00
	4 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	8.074.880,00
	Jumlah Keseluruhan	11.048.229.619,00

Total kebutuhan dana atau dana indikatif untuk membiayai 5 program dan 8 kegiatan serta 23 Sub Kegiatan tersebut adalah Rp. 11.048.229.619,00,- (Sebelas Milyar Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Kecamatan Pelaihari juga mempunyai unit kerja pembantu yaitu 5 (lima) kelurahan dengan Pelaksanaan Program, Kegiatan, yang di laksanakan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 akan di jabarkan sebagai berikut :

1. Kelurahan Sarang Halang

Dalam rangka implementasi Rencana Kerja Tahun 2023 Kelurahan Sarang Halang terdiri dari 2 Program, 7 Kegiatan, 16 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Program/Kegiatan Kelurahan Sarang Halang Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	207.994.655,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.049.000,00
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3.049.000,00
	2 Evaluasi kinerja perangkat daerah	0
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	858.500,00
	1 Koordnasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0
	2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	858.500,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.621.683,00
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.760.583,00
	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.068.551,00
	3 Penyediaan peralatan rumah tangga	12.648.703,00
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.843.846,00
	4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.300.000,00
	5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.624.228,00
	1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya	3.624.228,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.996.244,00	
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.300.000,00	
2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	89.696.244,00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.845.000,00	
1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizina kendaraan dinas operasional atau lapangan	36.145.000,00	
2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7.700.000,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	817.998.893,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	817.998.893,00
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	16.499.850,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
2	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	291.213.825,00
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	163.224.520,00
4	Evaluasi Kelurahan	347.060.698,00
Jumlah Keseluruhan		1.025.993.548,00

Total kebutuhan dana atau dana indikatif untuk membiayai 2 program dan 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan tersebut adalah Rp. 1.025.993.548,00,- (Satu Milyar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

2. Kelurahan Pabahanan

Dalam rangka implementasi Rencana Kerja Tahun 2023 Kelurahan Pabahanan terdiri dari 2 Program, 5 Kegiatan, 14 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Program/Kegiatan Kelurahan Pabahanan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	204.898.129,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.499.800,00
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.499.800,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0
	1 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi SKPD	0
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	0
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.561.336,00
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	994.225,00
	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16.648.104,00
	3 Penyediaan peralatan rumah tangga	3.996.298,00
	4 Penyediaan barang dan cetakan	3.972.709,00
	5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0
	1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.979.542,00
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.350.749,00
	2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00
	3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	89.696.244,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.790.000,00
	1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12.000.000,00
	2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9.790.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	797.999.436,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	797.999.436,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	6.360.393,00
2	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	410.821.000,00
2	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	258.043.160,00
2	Evaluasi Kelurahan	122.774.883,00
Jumlah Keseluruhan		1.002.897.565,00

3. Kelurahan Karang Taruna

Sesuai dengan tahapan perencanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023 Kelurahan Karang Taruna terdiri dari 2 Program, 6 Kegiatan, 15 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Program/Kegiatan Kelurahan Karang Taruna Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	208.671.729,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.379.400,00
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.379.400,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.675.000,00
1	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.675.000,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	0
1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.215.146,00
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	584.832,00
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.350.745,00
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.404.514,00
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.375.055,00
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	63.500.000,00
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.672.183,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.600.000,00
2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	87.072.183,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.730.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000,00
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.230.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	825.986.443,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	825.986.443,00
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	8.128.054,00
2	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	237.459.272,00
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	307.606.185,00
4	Evaluasi Kelurahan	272.792.932,00
Jumlah Keseluruhan		1.034.658.172,00

Total kebutuhan dana atau dana indikatif untuk membiayai 2 program dan 6 kegiatan serta 13 sub kegiatan tersebut adalah Rp. 1.034.658.172,- (Satu Milyar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

4. Kelurahan Angsau

Sesuai dengan tahapan perencanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023 Kelurahan Angsau terdiri dari 2 Program, 8 Kegiatan, 16 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.5 Program/Kegiatan Kelurahan Angsau Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	244.629.999,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.650.650,00
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6.650.000,00
	2 Evaluasi kinerja perangkat daerah	0
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.800,00
	1 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.999.800,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	6.000.000,00
	1 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	6.000.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.214.571,00
	1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.375.182,00
	2 Penyediaan peralatan rumah tangga	4.904.491,00
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	434.898,00
	4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0
	5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4.500.000,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.054.643,00
	1 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	36.054.643,00
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.620.835,00
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.500.350,00
	2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	112.120.305,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.089.500,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.539.500,00
	2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.550.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	909.999.604,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	909.999.604,00
	1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	6.852.833,00
	2 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	382.708.000,00
	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279.744.749,00
	4 Evaluasi Kelurahan	240.694.022,00
	Jumlah Keseluruhan	1.154.629.603,00

Total kebutuhan dana atau dana indikatif untuk membiayai 2 program dan 8 kegiatan serta 16 sub kegiatan tersebut adalah Rp. 1.154.629.603,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

5. Kelurahan Pelaihari

Sesuai dengan tahapan perencanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2022 Kelurahan Pelaihari terdiri dari 2 Program, 7 Kegiatan, 18 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.6 Program/Kegiatan Kelurahan Pelaihari Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	261.898.581,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.745.829,00
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.745.829,00
	2 Evaluasi kinerja perangkat daerah	0
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.129.059,00
	1 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.129.059,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	0
	1 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.433.537,00
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.970.160,00
	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.662.087,00
	3 Penyediaan peralatan rumah tangga	5.504.190,00
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.797.100,00
	5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4.500.000,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.671.251,00
	1 Pengadaan Mebel	2.207.157,00
	2 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	19.464.094,00
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.046.105,00
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.551.400,00
	2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.374.400,00
	3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	112.120.305,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.872.800,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.192.800,00
	2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9.680.000,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	877.807.904,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	877.807.904,00
	1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	17.406.160,00
	2 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	344.992.611,00
	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	314.894.705,00
	4 Evaluasi Kelurahan	200.514.428,00
	Jumlah Keseluruhan	1.139.706.485,00

Total kebutuhan dana atau dana indikatif untuk membiayai 2 program dan 6 kegiatan 18 sub kegiatan serta tersebut adalah Rp. 1.139.706.485- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7																				
7	1																			
7	1	1				7	1	01												
7	1	1	2.01			7	1	01	2.01											
7	1	1	2.01	1	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	7	1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	0	APBD			6 Dokumen	0
						7	1	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0				0	
						7	1	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0				0	
						7	1	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0				0	
						7	1	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0				0	
						7	1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan	4 Laporan	0				0	
7	1	1	2.01	7	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	7	1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan	4 Laporan	0	APBD			4 Laporan	0
7	1	1	2.02			7	1	01	2,02											
7	1	1	2.02	1		7	1	01	2,02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Pelaihari	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	11.446.604.380	APBD			12 bulan	12.018.934.599
7	1	1	2.02	3	Penyusunan laporan keuangan	7	1	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan	11 Dokumen	0	APBD			11 Dokumen	0
7	1	1	2.05					01	2,05											
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	7	1	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Pakaian Dinas	19 stel	0	APBD			19 stel	0
7	1	1	2.06					01	2,06											
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Jasa,	7	1	01	2,06	01	Penyediaan komponen instalasi	Kecamatan	Jumlah	20 Jenis	7.922.747	APBD			20 Jenis	8.318.884

Tabel 4.7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)							
7	1	1	2.06	2															
7	1	01	2.06	02															
7	1	01	2.06	04															
7	1	01	2.06	05															
7	1	01	2.06	09															
7	1	1	2.06	11															
7	1	1	2.07																
7	1	1	2.07	2															

BAB V

PENUTUP

Total kebutuhan dana indikatif Renja Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar Rp. 11.048.229.619,00,- (Sebelas Milyar Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023. Dana tersebut digunakan untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan berjumlah pada Kecamatan Pelaihari yaitu 5 program dan 9 Kegiatan.

Selain itu pada Kecamatan Pelaihari terdapat Unit Kerja Kelurahan berjumlah 5 (lima) Kelurahan yaitu 2 Program dan 7 Kegiatan. Untuk kebutuhan dana indikatif 5 (lima) Kelurahan lingkup wilayah Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Kelurahan Sarang Halang

Pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan dana indikatif Renja Kelurahan Sarang Halang sebesar Rp. 1.025.993.548,- (Satu Milyar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang dipergunakan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan berjumlah 2 Program dan 7 Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

2. Kelurahan Pabahanan

Pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan dana indikatif Renja Kelurahan Pabahanan sebesar Rp. 1.002.897.565,- (Satu Milyar Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang dipergunakan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan berjumlah 2 Program dan 5 Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

3. Kelurahan Karang Taruna

Pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan dana indikatif Renja Kelurahan Karang Taruna sebesar Rp. 1.034.658.172,- (Satu Milyar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang dipergunakan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan berjumlah 2 Program dan 6 Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

4. Kelurahan Angsau

Pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan dana indikatif Renja Kelurahan Angsau sebesar Rp. 1.154.629.603,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), yang dipergunakan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan berjumlah 2 Program dan 8 Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

5. Kelurahan Pelaihari

Pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan dana indikatif Renja Kelurahan Angsau sebesar Rp. 1.139.706.485,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang dipergunakan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan berjumlah 2 Program dan 7 Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023. Dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan di Kecamatan Pelaihari, tentunya juga akan mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2023. Oleh karena itu, kami berharap nantinya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Tim verifikasi RENJA juga akan mendukung program dan kegiatan yang sudah direncanakan agar permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pelaihari berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bisa ditindaklanjuti.

Pelaihari, Juli 2022

Camat Pelaihari,


RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
Pemina
NIP. 19840320200212 2 002